BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang memiliki banyak permasalahan lokal yang perlu untuk diatasi.Hampir semua negara berkembang memiliki permasalahan yang sama seperti masalah kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kriminalitas (Todaro dan Smith, 2009). Serta fasilitas yang belum memadahi dan banyaknya permasalahan di tingkat desa dan daerah-daerah yang sulit dijangkau karena buruknya infrastruktur. Untuk meningkatkan kualitas negara, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, diperlukan usaha dan perencanaan yang matang dan terencana. Banyaknya permasalahan dan hal-hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan akan memberatkan usaha pemerintah pusat jika tidak dibantu oleh pemerintah-pemerintah daerah yang lebih mengenal tentang daerahnya masing-masing. Seperti topografi, kelemahan maupun kurangnya kelengkapan fasilitas yang dimiliki dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Solusi untuk meningkatkan pembangunan secara serentak di daerah-daerah adalah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang desentralisasi.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1974 bahwa penyerahan wewenang kepada daerah bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien

yang kemudian menghasilkan otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing. Dengan menggali potensi yang ada, serta meningkatkan fasilitas yang belum mencukupi, diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Indonesia.

Solusi untuk mempercepat pembangunan adalah dengan menetapkan pusat pertumbuhan pada wilayah tersebut. Hal tersebut dapat mengatasi keterbatasan dana dalam melaksanakan pembangunan dengan berfokus pada satu wilayah, yaitu daerah yang berperan sebagai pusat pertumbuhan, dalam meningkatkan pembangunannya, bisa berupa pelengkapan fasilitas dan perbaikan infrastruktur. Diharapkan daerah pusat pertumbuhan dapat menimbulkan *spillover effect* positif pada daerah pendukungnya atau *hinterland* dari daerah pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang dijadikan pusat perdagangan, pusat industri, pusat pelayanan, dan pusat perekonomian. Dengan segala kelengkapan yang ada pada daerah pusat, maka wilayah pusat pertumbuhan dijadikan daerah yang mampu melayani daerah belakangnya atau *hinterland*. Berbagai kelengkapan fasilitas yang dimiliki daerah pusat seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, supermarket, terminal, tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang bermukim di daerah pusat saja, tetapi masyarakat yang berasal dari *hinterland* juga bisa memanfaatkannya (Utari, 2015).

Infrastruktur dan fasilitas sangatlah berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat maupun pembangunan wilayah. Juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah. Semakin

lengkap fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah maka masyarakat dapat lebih mudah dalam mengaksesnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada. Dalam melakukan pembangunan wilayah, fasilitas yang perlu disediakan akan sangat mempengaruhi kehidupan di wilayah tersebut. Fasilitas yang dapat di akses masyarakat di wilayah *hinterland* tidak boleh diabaikan agar tidak terjadi kesenjangan wilayah dengan daerah pusat. Perbedaan jumlah maupun ketersediaan fasilitas antar daerah akan menimbulkan hierarki yang dapat dianalisis menggunakan skalogram. Pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan dapat memberikan manfaat atau *spillover effect*positif terhadap *hinterland*, sehingga gap yang ada tidak terlalu besar. Dengan menentukan pusat pertumbuhan dengan memfokuskan pertumbuhan terutama perekonomian pada daerah tersebut, akan menyebarkan efek yang menguntungkan bagi wilayah-wilayah disekitarnya. Perkembangan wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan produksi daerah *hinterland* sehingga daerah *hinterland* juga akan mengalami perkembangan.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari wilayah Yogyakarta yang terkenal sebagai Kota Pelajar di Indonesia. Banyaknya fasilitas pendidikan dengan kualitas baik yang terdapat di Sleman merupakan daya tarik bagi masyarakat yang berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta untuk datang dan menimba ilmu. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, didapati Kabupaten Sleman memiliki 41 perguruan tinggi, merupakan angka yang besar pada sarana pendidikan. Banyaknya jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Sleman

menimbulkan tingginya tingkat imigran yang datang untuk berkuliah di universitas-universitas di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, seperti terdapat pada tabel berikut,

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km^2 menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	**Kecamatan / *Ditricts***	**Luas Wilayah / *Total Area* (Km^2)**	**Banyaknya Penduduk / *Population***	**Kepadatan Penduduk Per Km^2/ *Population Density per Km^2***
1	Moyudan	27,62	30.719	1.112
2	Minggir	27,27	28.954	1.062
3	Seyegan	26,63	46.869	1.760
4	Godean	26,84	70.754	2.636
5	Gamping	29,25	106.330	3.635
6	Mlati	28,52	111.180	3.898
7	Depok	35,55	185.707	5.224
8	Berbah	22,99	56.813	2.472
9	Prambanan	41,35	48.419	1.171
10	Kalasan	35,84	84.150	2.348
11	Ngemplak	35,71	64.187	1.797
12	Ngaglik	38,52	115.321	2.994
13	Sleman	31,32	66.567	2.125
14	Tempel	32,49	50.628	1.558
15	Turi	43,09	34.189	793
16	Pakem	43,84	37.430	854
17	Cangkringan	47,99	29.246	609
Jumlah/Total		**574,82**	**1.167.481**	**2.031**

Sumber : Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2016
BPS Kabupaten Sleman

Tabel 1.2
Migrasi Penduduk per kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	Kecamatan/ *Districts*	Lahir / *Born*	Datang / *In Migration*	Pindah / *Out Migration*	Mati / *Death*
1	Moyudan	776	395	291	455
2	Minggir	460	369	225	317
3	Seyegan	353	499	347	219
4	Godean	310	976	626	254
5	Gamping	547	1.726	1.162	291
6	Mlati	735	1.438	1.061	431
7	Depok	1.118	2.729	2.085	615
8	Berbah	366	973	642	181
9	Prambanan	437	630	515	244
10	Kalasan	1.064	1.427	887	491
11	Ngemplak	631	1.022	578	250
12	Ngaglik	803	2.342	1.162	276
13	Sleman	755	1.022	534	467
14	Tempel	173	513	346	104
15	Turi	471	351	285	279
16	Pakem	384	528	308	243
17	Cangkringan	386	272	212	218
Jumlah / Total		**9.769**	**17.212**	**11.267**	**5.335**
Tahun / *Year* 2014		14.844	12.885	9.439	4.985
Tahun / *Year* 2013		9543	14.464	11.121	5.047

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BPS Kabupaten Sleman

Dengan makin banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman, perlu untuk melakukan peningkatan fasilitas sebagai pendorong kegiatan ekonomi maupun pelayanan terhadap masyarakat. Fasilitas yang dimiliki oleh tiap kecamatan pasti berbeda-beda. Perbedaan fasilitas tersebut akan menjadi hierarki penentuan wilayah pusat pertumbuhan. Kecamatan yang memiliki fasilitas yang paling lengkap akan menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Dan kecamatan yang fasilitasnya kurang, akan menjadi *hinterland* atau wilayah pendukung bagi wilayah pusat. Dalam meningkatkan pertumbuhan wilayah, hal tersebut penting untuk diketahui sehingga dapat menyusun rencana ataupun proyek yang cocok untuk dikembangkan pada masing-masing kecamatan. Penentuan wilayah pusat

pertumbuhan dan *hinterland* dapat diketahui dengan menggunakan analisis skalogram. Serta analisis gravitasi digunakan untuk melihat keterkaitan atau interaksi pada tiap-tiap kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan kecamatan sebagai *hinterland.*

Dengan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul

"Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* di Kabupaten Sleman"

4.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pencapaian suatu kecamatan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman dibandingan keadaan sebenarnya?
2. Bagaimana tingkat ketersediaan fasilitas publik pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pencapaian penentuan suatu kecamatan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis tingkat ketersediaan fasilitas publik pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan untukmenentukan kebijakan dalam peningkatkan dan pembangun fasilitas publik, serta dalam menentukan kecocokan kecamatan dengan program-program yang akan dilaksanakan.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan dan referensi dalam penulisan penelitiaan selanjutnya ataupun dalam penulisan skripsi selanjutnyayang berhubungan dengan pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari:

1. BAB I: Pendahuluan

   Pada bagian ini menguraikan latar belakang topik yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

2. BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

   Pada bagian ini mengemukakan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang didapat dari jurnal dan hasil skripsi yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan penulis. Serta

memaparkan tentang teori pusat pertumbuhan, teori tempat sentral dan teori ekonomi regional, yang bersangkutan dengan penelitian.

3. BAB III: Metode Penelitian

   Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV: Hasil dan Analisis

   Pada bagian ini memaparkan data yang diperoleh dalam penelitian pada sub bab deskripsi data penelitian, serta menjelaskan semua temuan-temuan dari penelitian dan analisis yang dilakukan pada sub bab hasil dan analisis.

5. BAB V: Simpulan dan Implikasi

   Bagian ini mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan serta memberikan saran ataupun masukan bagi pihak terkait.